

Strategi BUMDES dalam Meningkatkan Potensi dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kabupaten Seluma dengan Metode Criterium Plus-AHP

Kresnawati¹, Siti Hanila²

Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu, Jalan Meranti Raya No. 32 Sawah Lebar
Bengkulu

Email: ¹ragilkresnawati25@gmail.com, ²st.hanila@gmail.com

ABSTRAK

Untuk mendapatkan strategi inovasi yang terbaik bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir desa Sukasari, Lawang Agung dan Kunkai Baru Kabupaten Seluma digunakan analisis pemetaan potensi dan permasalahan yang terjadi di BUMDES dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) melalui teknik analisis SWOT dan analisis *Criterium Plus – Analytical Hierarchy Process*. Hasil kajian menunjukkan ada 4 prioritas persoalan yang terjadi pada BUMDES yang ada yaitu persoalan tata kelola keuangan yang lemah, manajemen BUMDES yang lemah, akses pemasaran terbatas, serta kemiripan bidang usaha BUMDES dengan BUMDES lainnya. Strategi penyelesaian masalah dapat dilakukan melalui upaya membangun jaringan pemasaran, studi kelayakan usaha melalui cek kesehatan BUMDES dan membangun sinergi dengan Pemerintah Daerah terkait Izin Taman Wisata.

Kata Kunci: Strategi; Bumdes; Kesejahteraan; Masyarakat Pesisir.

ABSTRACT

To get the best innovation strategy for Village-Owned Enterprises (BUMDES) to improve the economic well-being of coastal communities in Sukasari, Lawang Agung and Kunkai Baru villages, Seluma Regency, an analysis of potential mapping and problems that occur in BUMDES using the Focus Group Discussion (FGD) method through techniques SWOT analysis and Criterium Plus - Analytical Hierarchy Process analysis. The results of the study showed that there were 4 priority issues that occurred in the existing BUMDES, namely the problem of weak financial governance, weak management of BUMDES, limited marketing access, and similarities in the business fields of BUMDES to other BUMDES. The strategy for problem solving can be done through efforts to build a network of marketing, business feasibility studies through BUMDES health checks and build synergies with the Regional Government regarding Park Tourism Permits.

Keywords: Strategy; Bumdes; Welfare; Coastal Society.

1. Pendahuluan

Dalam UU Desa, BUM Desa didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam perkembangannya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui unit usaha yang dibangunnya, masih jauh dari harapan (Purnamasari, 2017). Adapun faktor yang mempengaruhinya diantaranya: Pemahaman perangkat desa mengenai BUMDES masing sangat kurang, Konsep pembangunan desa masih sebatas pemahaman pembangunan fisik dan atas arahan struktur dari atas. Lemahnya pembangunan SDM, sehingga kapasitas kelembagaan dan

kewirusahaan desa tidak berkembang. Komunikasi antara elit desa dengan warga masyarakat mengenai berbagai isu belum berjalan begitu baik.

Faktor lainnya meliputi perilaku yang koruptif, membuat spirit menciptakan perubahan sosial untuk masyarakat menjadi loyo dan bahkan malah meniru tindakan itu. Terbukti ada ratusan kepala desa yang saat ini menghadapi meja hijau karena diduga menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan dirinya sendiri. Banyaknya program pemerintah sebelum BUMDes seperti KUD, BUUD dan berbagai program lainnya yang gagal sebagian warga desa berpikir bahwa mereka tidak harus mengembalikan dana yang seharusnya menjadi modal bagi usaha desa yang dijalankan BUMDes. Penguasaan kemampuan manajerial yang kurang memadai serta masih sulit meyakinkan kaum muda bahwa BUMDes bisa menjamin kesejahteraan bagi para pegiatnya. Ini yang membuat anak muda belum banyak berkiprah di BUMDes, berakibat logika usaha yang dibangun sebagian besar BUMDes masih dijalankan dengan model konvensional dan belum banyak inovasi yang dilakukan oleh BUMDes.

Gencarnya kampanye yang menciptakan citra bahwa BUMDes harus menghasilkan keuntungan besar dengan bentuk profit (rupiah), sangat kelihatan dari ukuran keberhasilan BUMDes yang sering diukur dari laba yang disetorkan ke kas desa. Cara pandang seperti ini membuat para kepala desa dan perangkat desa tambah beban berat karena harus menciptakan unit usaha dengan omset dan untung besar bagi desa.

Di sisi lain persoalan kesejahteraan perekonomian, khususnya di kawasan pesisir masih perlu menjadi perhatian pemerintah. Masalah yang umum dihadapi masyarakat pesisir antara lain tingkat kemiskinan (ketidakpastian ekonomi), kerusakan sumberdaya pesisir, dan kesehatan lingkungan, serta pemanfaatan area laut bagi nelayan (Firdaus, 2017)

Desa Sukasari, Kungkai Baru dan Lawang Agung merupakan wilayah yang berada di bagian Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu (peta wilayah kabupaten Seluma, 2017). Ketiga desa ini berada di wilayah pesisir yang langsung berbatasan langsung dengan samudera Hindia. Sebagai wilayah pesisir desa-desa ini memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut. Dengan adanya potensi tersebut, didukung dengan BUMDes yang ada seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir tersebut. Hal tersebut menjadi dasar dalam penelitian ini dalam memetakan permasalahan BUMDes sehingga didapatkan penyelesaian masalah yang tepat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya yang dilakukan BUMDes dalam rangka meningkatkan potensi dan kesejahteraan ekonomi di wilayah kawasan pesisir Kecamatan Air Periukan. *Output* dari penelitian ini adalah menemukan strategi inovasi yang tepat dan harapan program *one village one product* dapat terwujud berdasarkan potensi, dan sumber daya yang ada

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

BUMDes merupakan badan usaha yang ditetapkan melalui Peraturan Desa berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Desa, berdasarkan pada Peraturan Desa dan tidak membutuhkan pengesahan dari Akta Notaris. Meskipun demikian, berdasarkan pasal 7 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Dasar Hukum BUMDes meliputi : Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Tujuan BUMDesa yaitu diantaranya meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa. Penyertaan Modal Desa, terdiri atas hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor, bantuan Pemerintah melalui mekanisme APB Desa, aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

2.2. Strategi

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi factor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif (Porter, 2008).

2.3. Inovasi

Menurut UU No. 18 Tahun 2002, inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau pun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau pun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau pun proses produksinya. Strategi inovasi adalah berkaitan dengan respon strategi Perusahaan dalam mengadopsi inovasi. Dalam penelitian-penelitian terdahulu bermacam-macam tipologi strategi inovasi sudah digunakan. Menurut Freeman (1978) yang mengemukakan 6 penggolongan tipologi strategi inovasi yaitu : *offensive innovation strategy, defensive, imitative (suka meniru), dependent, traditional, dan opportunist strategy*. Penggolongan ini berdasarkan pada kecepatan dan waktu masuk dari Perusahaan menuju area teknologi yang baru (Hadjimanolis & Dickson, 2000).

Urban & Hauser (1980) membedakan tipologi strategi inovasi dengan proaktif strategi, dimana Perusahaan mencoba untuk meramalkan dan mengantisipasi perubahan lingkungan (Hadjimanolis & Dickson, 2000). Tipe ini biasanya merupakan Perusahaan yang pertama melakukan inovasi (*first mover*). Keunggulan yang dimiliki adalah membangun *market share* dan reputasi untuk inovasi, namun mempunyai kelemahan karena harus mengeluarkan biaya pengembangan yang tinggi serta resiko investasi teknologi atau desain yang salah. *Reactive strategy* adalah Perusahaan yang hanya bereaksi terhadap permintaan konsumen dan aktivitas pesaing, serta cenderung untuk mengadopsi proses inovasi perusahaan lain (Rogers, 1983).

2.4. Potensi Kesejahteraan Ekonomi

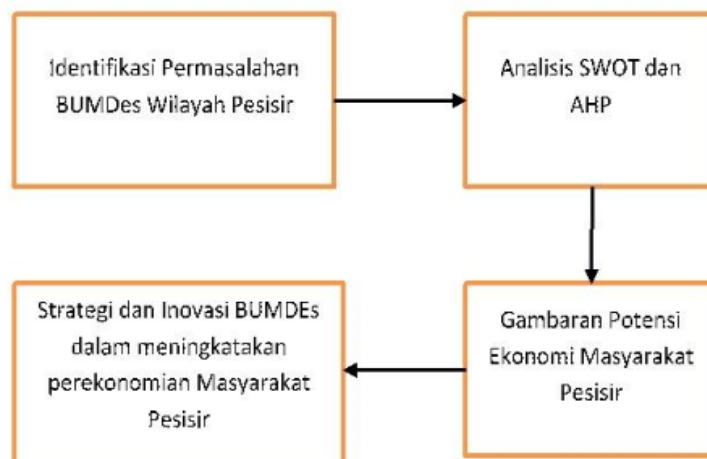
Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan (Lincoln Arsyad dalam Djamaludin, 2012). Menurut Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat pengertian sejahtera yaitu suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan lainnya seperti lingkungan bersih, aman, dan nyaman. Indikator ekonomi yang banyak digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain pendapatan per kapita (GNP atau PDB) dan jumlah tabungan, Sedangkan indikator pertumbuhan ekonomi adalah Struktur perekonomian dan tingkat urbanisasi,

2.5. Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir atau dikenal dengan bahasa asing Coastal Community, ialah suatu masyarakat yang memiliki ciri utama yang tidak memproduksi barang dan jasa secara ekonomi. Menurut Soegiarto dalam Dahuri (2012) masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dengan mengantungkan hidupnya dalam ekosistem laut.

3. Metode Penelitian

Berikut *Road map* Penelitian yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan BUMDes yang mandiri, produktif, memiliki keunggulan bersaing serta mampu memaksimalkan potensi di wilayah pesisir kabupaten Seluma, dengan mengembangkan BUMDes yang inovatif, sehingga kesejahteraan secara ekonomi masyarakat dapat tercapai. Gambar 1 berikut ini :



Gambar 1. Road Map Penelitian

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di empat desa di wilayah pesisir Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, meliputi Desa Sukasari, Kunkai Baru, dan Lawang Agung.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dan FGD (*Focus Group Discussion*) dan melakukan observasi langsung terhadap kegiatan BUMDes dan masyarakat. Data sekunder diperoleh melalui literatur-literatur, keputusan menteri, maupun data Biro Pusat Statistik (BPS), maupun penelitian terkait strategi, inovasi dan BUMDes.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dilakukan melalui pola FGD bersama pengurus BUMDes, Kepala Desa, dan Tokoh masyarakat, nelayan, petani/pedagang. FGD dilakukan dengan cara terbuka sehingga memungkinkan anggota masyarakat lainnya dapat hadir. *Accidental sampling* dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan pengamatan langsung kepada BUMDes dan masyarakat desa. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan potensi sumber daya dan kondisi sosial ekonomi masyarakat (Sekaran, 2011).

3.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis SWOT (*Strength, weakness, Opportunity, Threat*) dan *Criterion Plus – Analytical Hierarchy Process*. Analisa SWOT dilakukan untuk mendapatkan gambaran permasalahan pada BUMDes di wilayah pesisir kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma. David (2015) menyatakan bahwa SWOT merupakan alat penting untuk mengembangkan empat tipe strategi : 1). Strategi Kekuatan-Kesempatan, 2). Strategi Kelemahan – Kesempatan, 3). Strategi Kelemahan – Ancaman, 4). Strategi Kekuatan – Ancaman. Marimin dalam Firdaus (2016) terdapat tiga tahapan dalam melakukan analisis SWOT, yaitu, pengambilan data dengan melakukan evaluasi eksternal dan internal. Kedua melakukan matriks internal eksternal dan matriks SWOT, Tahap ketiga pengambilan keputusan. Tahapan analisis SWOT pada Tabel 1.

Dengan menggunakan AHP, suatu persoalan yang akan dipecahkan dalam suatu kerangka berpikir yang terorganisir, sehingga memungkinkan dapat diekspresikan untuk mengambil keputusan yang efektif atas persoalan tersebut. Persoalan yang kompleks dapat disederhanakan dan dipercepat proses pengambilan keputusannya (Saaty dalam Marimin 2011).

Setelah melakukan proses analisis SWOT dan mendapatkan *input* dari permasalahan yang dikategorikan yang direspon oleh responden, permasalahan tersebut kemudian diberi bobot nilai dalam analisis AHP pada setiap desa wilayah pesisir di Kecamatan Air Periukan.

Tabel 1. Penjelasan dalam analisis matriks SWOT

| Kategori/Category | Kekuatan (Strength) Identifikasi Faktor Kekuatan Internal | Kelemahan (Weakness) Identifikasi Faktor Kelemahan Internal |
|---|--|---|
| Peluang (Opportunities) Identifikasi Faktor Peluang Eksternal | Strategi SO Formulasikan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang | Strategi WO Formulasikan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan kekuatan |
| Ancaman (Threats) | Strategi ST | Strategi WT |

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| Identifikasi Faktor Ancaman Eksternal | Formulasi strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman | Formulasikan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman |
|---------------------------------------|--|---|

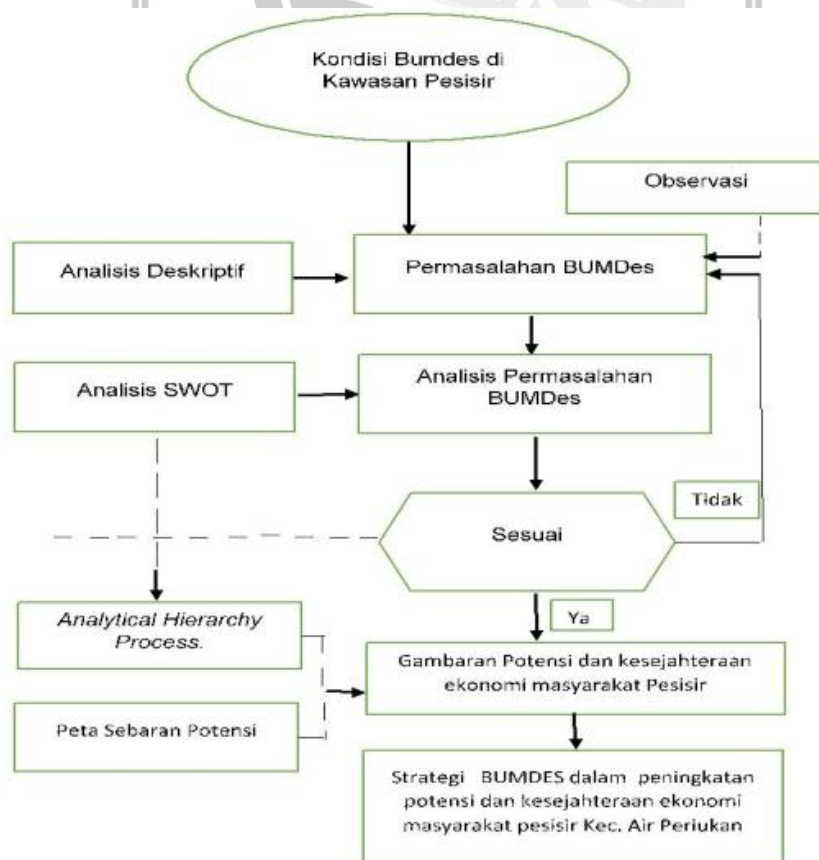
Sumber : Radiarta 2015

AHP dilakukan untuk menggambarkan prioritas permasalahan berdasarkan kategori secara umum dan terjadi pada setiap desa. Nilai dan definisi pendapat kualitatif dari skala perbandingan Saaty (1983) disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai dan definisi pendapat kualitatif dari skala perbandingan Saaty (1983)

| Nilai/Score | Keterangan |
|-------------|---|
| 1 | Faktor vertikal sama penting dengan faktor horizontal |
| 3 | Faktor vertikal lebih penting dari horizontal |
| 5 | Faktor vertikal jelas lebih penting dari faktor horizontal |
| 7 | Faktor vertikal sangat jelas lebih penting dengan faktor horizontal |
| 9 | Faktor vertikal mutlak lebih penting dari faktor horizontal |
| 2,4,6,8 | Apabila ragu-ragu antara dua nilai elemen yang berdekatan |
| 1/(2-9) | Kebalikan dari keterangan 2-9 |

Sumber : Saaty (1983) dalam marimin (2011)



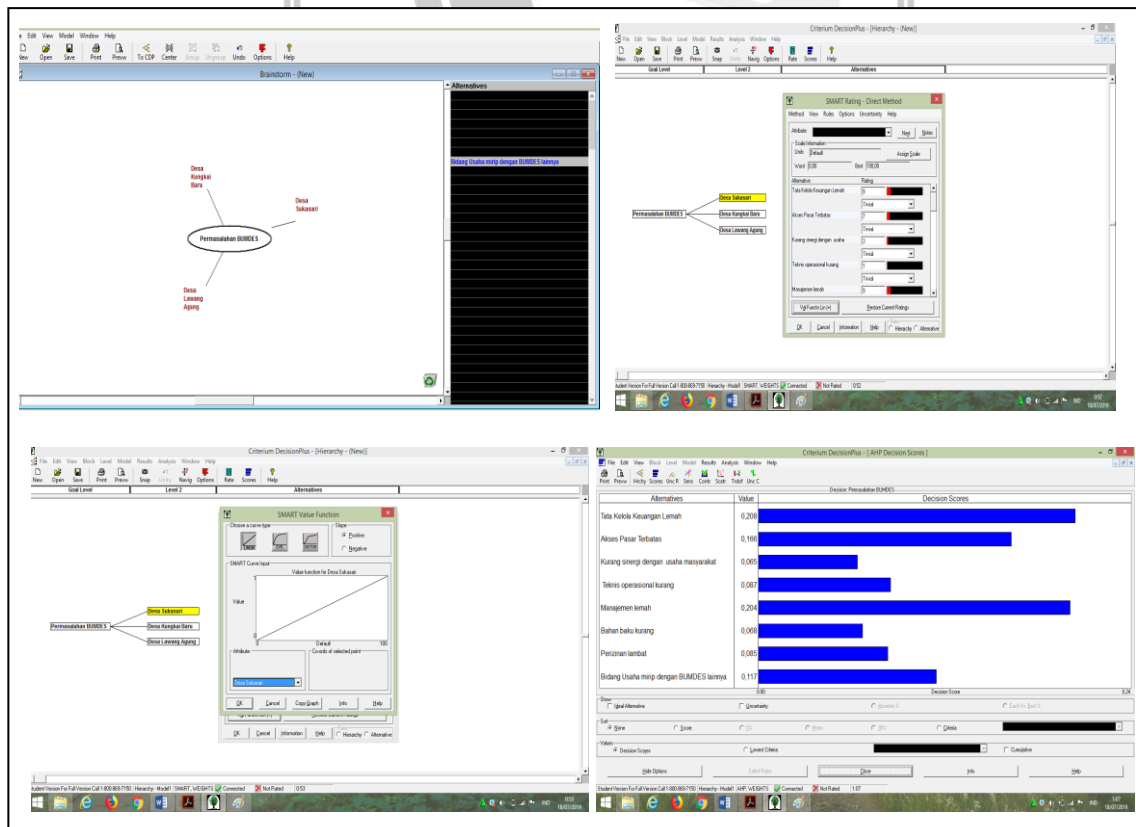
Gambar 2. Alur pemikiran kajian kondisi Bumdes di wilayah pesisir

4. Hasil dan Pembahasan

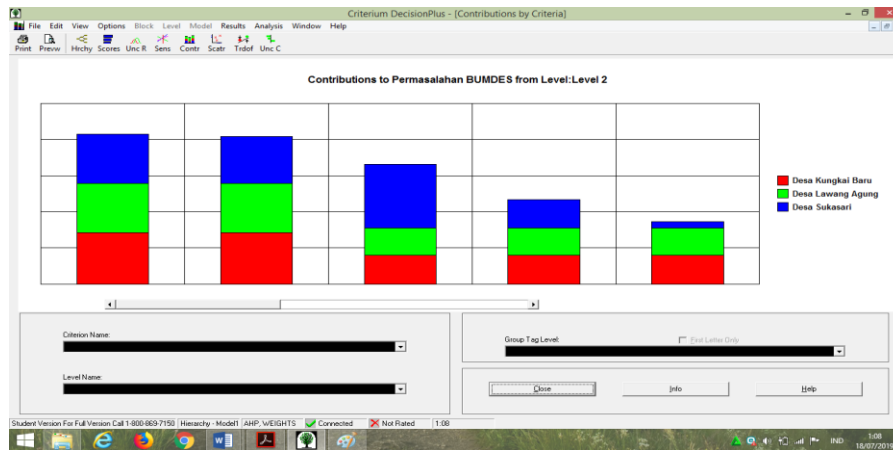
Kondisi Umum Desa Lawang Agung, Desa Sukasari dan Desa Kungkai Baru Desa Lawang Agung merupakan jalur yang dilalui ketika menuju desa Sukasari dan Desa Kungkai Baru, jika kita dari arah ibu kota kabupaten Seluma. Penduduk di desa Lawang agung mayoritas adalah penduduk asli ber etnis Serawai, sedangkan untuk desa Sukasari dan Kungkai agung merupakan daerah transmigrasi tahun 1970 sehingga banyak beretnis jawa dan Bali.

BUMDES Lawang Agung produk unggulannya meliputi dodol pepaya, mengelola PAMSIMAS desa, sedangkan untuk desa Sukasari meliputi produk minuman sari Jahe Merah, Sabun Pencuci piring dan Minyak Sereh Wangi, mengelola pasar desa dan kegiatan simpan pinjam. Untuk Desa Kungkai Baru bidang usaha BUMDES meliputi Sewa Ruko, dan mengelola pantai sebagai daerah wisata. Namun hal ini masih menjadi persoalan dikarenakan pantai tersebut menurut BKSDA merupakan kawasan hutan lindung, tetapi masyarakat berharap hutan tersebut dapat dikelola oleh BUMDES sebagai kawasan hutan wisata. Persoalan ini sampai saat ini masih dalam proses penurunan status dari kawasan hutan lindung menjadi TWA sehingga boleh dikelola oleh masyarakat/BUMDES.

Berdasarkan hasil FGD dan observasi di lapangan gambaran permasalahan yang ada di BUMDES desa Sukasari, desa Kungkai Baru dan desa Lawang Agung adalah tata kelola keuangan yang lemah, kendala pemasaran, ketersediaan bahan baku, pemilihan jenis usaha, perizinan pengelolaan hutan wisata serta dukungan dari pemerintah daerah, sementara potensi yang dimiliki oleh BUMDES adalah kekompakan dan partisipasi warga yang tinggi untuk mendukung program desa, SDM yang cukup memadai, dan rumah ibadah dan pantai yang eksotis.



Gambar 3. Proses Pengujian Kriteria sesuai data di Lapangan



Gambar 4. Grafik Hasil Akhir Strategi dan Kontribusi

Kompleksitas permasalahan yang dialami BUMDES di daerah pesisir Kabupaten Seluma meliputi desa Lawang Agung, Desa Sukasari dan desa Kungkai Baru harus diselesaikan secara komprehensif. Strategi permasalahan diselesaikan dengan alat analisis SWOT. Model matriks *Internal Factors Analysis Summary* (IFAS) digunakan untuk menggambarkan kekuatan dan kelemahan keadaan internal masyarakat desa Lawang Agung, Desa Sukasari dan desa Kungkai Baru, sedangkan untuk menggambarkan peluang dan ancaman keadaan eksternal masyarakat 3 desa tersebut dilakukan dengan menggunakan matriks *External Factors Analysis Summary* (EFAS).

Penilaian model matriks IFAS dan EFAS didapatkan berdasarkan pembobotan yang diberikan responden terhadap kondisi dan masalah, serta dianalisis sesuai dengan kriteria analisis SWOT yaitu kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*treat*). Hasil pembobotan tersebut kemudian disajikan dalam bentuk model matriks IFAS dan EFAS.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis hasil FGD dan pembobotan menggunakan AHP maka ditemukan 4 persoalan mendasar bagi BUMDES yang ada di wilayah pesisir kabupaten Seluma meliputi desa Lawang Agung, Desa Sukasari dan desa Kungkai Baru, yaitu tata kelola keuangan dan manajemen yang masih lemah, akses pasar yang terbatas, dan adanya kemiripan bidang usaha yang sejenis dengan desa lainnya. Untuk itu strategi yang harus dilakukan dalam upaya pengembangan BUMDES adalah studi cek kesehatan BUMDES secara internal dan membangun sinergitas yang lebih kuat kepada pemerintah daerah.

5. Persembahan

Direktorat Riset dan Pengembangan Masyarakat-Kemenristek Dikti Republik Indonesia. Hibah Penelitian Dosen Pemula Tahun Anggaran 2019.

6. Referensi

Ancok, Djamaludin. 2012. Psikologi Kepemimpinan & Inovasi. Jakarta: Erlangga

Bappeda Provinsi Bengkulu (2017). Dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017.



- Dahuri, Rochmin. 1996. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita
- David Fred, Forest. (2015) *Manajemen Strategik : Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing – Konsep*. Jakarta: Salemba Empat
- Firdaus, Pelupesy, Tampubolon (2017). *Strategi penyelesaian masalah sosial ekonomi masyarakat pesisir di kepulauan Banda Neira, kabupaten Maluku Tengah*. Jakarta :*Yayasan Strategi Konservasi Indonesia*
- Hadjimonalis, Anthanasios., Keith Dickson (2000), *Innovation Strategies of SMEs in Cyprus, Small Developing Country, International Small Business journal*
- Marimin, Magfiroh, .N. 2011. *Aplikasi Teknis Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Rantai Pasokan*. IPB Press Bogor Hal. 92 – 98
- Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Porter, Michael, E.2008. *Strategi Bersaing (Competitive Strategy)*. Tangerang, Kharisma Publising Group
- Purnamasari Nurul, (2016). *potensi dan permasalahan yang dihadapi badan usaha milik desa (BUMDesa)*. Yogyakarta : Yayasan Penabulu
- Radiarta, I.N., Erlania, dan Haryadi, J, 2015. *Analisis Pengembangan Perikanan Budi Daya berbasis AHP – Jurnal Kelautan dan Perikanan Balitbang KP KKP*. 10(1): 47
- Rogers, Everett M. 1983. *Diffusion of Innovations. Third Edition. New York: Macmillan Publishing Co., Inc*
- Sekaran Uma. 2011. *Research Methods For Business*. Jakarta : Salemba Empat
- UU No 18 Tahun 2002 Purnamasari Nurul, (2016). *potensi dan permasalahan yang dihadapi badan usaha milik desa (BUMDesa)*. Yogyakarta : Yayasan Penabulu
- UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- <http://bappeda.bengkuluprov.go.id/wpcontent/2018/RAD%20PPDT%20Provinsi%20Bengkulu%20TA%202017%20FINAL20CETAK.pdf>